

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA ANJUNGAN DALAM KECAMATAN ANJONGAN KABUPATEN MEMPAWAH

Oleh:

YEREMIAS^{1*}

NIM : E1011131131

Martoyo^{2*}, Kartika Ningtias^{2*}

*Email: e1011131131@student.untan.ac.id

- 1 Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
- 2 Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang berfokus pada partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Jalan Usaha Tani RT.006 di Desa Anjungan Dalam Kecamatan Anjungan Kabupaten Mempawah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Yadav dalam bukunya Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto (2019:82-84), yang mengemukakan tentang adanya empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan, yaitu : 1) Perencanaan dan pengambilan keputusan, kesimpulannya adalah masyarakat berpartisipasi dalam tahap merencanakan dan mengambil keputusan pembangunan di wilayahnya; 2) Pelaksanaan kegiatan, kesimpulannya adalah masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan; 3) Pemantauan dan evaluasi, kesimpulannya adalah masyarakat melakukan pemantauan terhadap hasil pembangunan tetapi belum berperan aktif dalam proses evaluasi; serta 4) Pemanfaatan hasil pembangunan, kesimpulannya adalah masyarakat memanfaatkan hasil pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kembali memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan, terkhusus tahap evaluasi, agar pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Fisik, Pembangunan Desa.

**COMMUNITY PARTICIPATION IN DEVELOPMENT IN ANJUNGAN DALAM
VILLAGE, ANJONGAN SUB-DISTRICT,
MEMPAWAH REGENCY**

by

YEREMIAS^{1*}

Student Number: E1011131131

Martoyo^{2*}, Kartika Ningtias^{2*}

email: e1011131131@student.untan.ac.id

1. Student of Government Science Study Program at the Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak,
2. Lecturer of Government Science Study Program at the Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak.

ABSTRACT

This study aims to analyze community participation in development which focuses on community participation in the construction of Jalan Usaha Tani RT.006 in Anjungan Dalam Village, Anjongan Sub-District, Mempawah Regency. The method used in this study was qualitative descriptive. This study used the theory of Yadav in a book by TotokMardikanto and PoerwokoSoebiato (2019: 82-84), which suggests that there are four types of activities that show community participation in development activities, namely: 1) Planning and decision making, the conclusion is that the community participates in development activities. the stage of planning and making decisions related to development in its area; 2) Implementation of activities, the conclusion is that the community participates in the implementation of development; 3) Monitoring and evaluation, the conclusion is that the community monitors the results of development but has not yet played an active role in the evaluation process; and 4) Utilization of the results of development, the conclusion is that the community utilizes the results of development in accordance with the needs of the community. Recommendations from this research are among others, that the Village Government and the Village Consultative Body (BPD) should provide information to the community about the importance of the active role of the community in development, especially in the evaluation stage, so that the development is in accordance with the needs of the community.

Keywords: Community Participation, Physical Development, Village Development.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Sebagaimana negara yang menganut paham demokrasi, maka partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting dalam Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan membuat pembangunan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Partisipasi masyarakat sering diperbincangkan di berbagai wilayah, baik di daerah kota maupun perdesaan karena dapat kita lihat begitu besar pengaruh dari partisipasi tersebut. Partisipasi masyarakat ini sangat menentukan suatu perencanaan atau program-program yang ada di sekitar mereka, keberhasilan suatu program tanpa adanya partisipasi masyarakat tidak akan berjalan dengan baik, karena keikutsertaan masyarakat akan sangat dibutuhkan dalam perencanaan atau pelaksanaan program, agar program berjalan dengan semestinya dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan memerlukan

kesadaran masyarakat akan minat dan kepentingan untuk secara mandiri berkontribusi dalam pembangunan. Peran masyarakat dalam pembangunan sekarang ini bukan hanya sebagai objek saja, tetapi juga sebagai subjek dari pembangunan tersebut. Prinsip pembangunan yang berpusat pada rakyat menegaskan masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur mengenai pelaksanaan system desentralisasi di Negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan. Landasan pemikiran dalam pengaturan desa yang dianut dalam UU No. 32/2004 sesungguhnya tetap mempertahankan apa yang dianut dalam UU No. 22/1999, yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Landasan ini sangat kontras dibanding yang dianut sebelumnya dalam

UU No. 5/1979 yang dinyatakan secara tegas mengarah pada penyegaran bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional.

Kemudian adanya Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan desa, termasuk di dalamnya tentang kewajiban yang tidak bias ditawarkan lagi oleh pemerintah kabupaten untuk merumuskan dan membuat peraturan daerah tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari kewenangan fiscal desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah adanya kepastian untuk pembiayaannya.

Pentingnya pembangunan yang menyentuh desa serta aspek kehidupan masyarakatnya, menempatkan pemerintah dengan kewajibannya untuk melaksanakan pembangunan ditingkat desa. Merencanakan suatu program bukan

merupakan pekerjaan yang mudah. Program yang baik harus sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang menjadi sasaran dari program tersebut, semakin beragam dan kompleks kebutuhan dan permasalahan dari kelompok sasaran, akan semakin rumit penyusunan perencanaan suatu program. Masyarakat (kelompok sasaran) mempunyai karakteristik tertentu. Masyarakat memiliki kebutuhan dan minat yang beragam, kemampuan mereka dalam menganalisis situasi dihadapi juga beragam, kemampuan mereka dalam mengambil keputusan juga tidak sama antar kelompok masyarakat satu dengan yang lainnya.

Dalam merencanakan sebuah program, idealnya, masyarakat mesti memiliki kemampuan dan keterampilan seperti pemahaman tentang makna dan hakikat perencanaan prinsip-prinsip, penyusunan program, kemampuan mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi kelompok sasaran kemampuan untuk memilih dan merumuskan tujuan, kemampuan melihat metode untuk mencapai tujuan, kemampuan dan keterampilan dalam

melibatkan masyarakat setempat dalam proses perencanaan.

Perencanaan sendiri memiliki banyak makna menurut pandangan masing-masing ahli dan belum terdapat Batasan yang dapat diterima secara umum. Menurut Khairuddin (1992 : 47), perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa perencanaan program itu berjalan secara sistematis, jelas dan terarah, dengan adanya suatu program yang jelas, dengan perencanaan akan dapat membedakan antara kebutuhan yang penting dan kebutuhan yang kurang penting. Suatu program yang baik tidak terjadi secara kebetulan, akan tetapi melalui proses perencanaan dan dibangun dengan kerangka pemikiran yang matang. Kebutuhan akan adanya perencanaan ini penting karena berbagai permasalahan yang dihadapi mestinya ditangani sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat agar pembangunan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Penjelasan pada pasal 78 UU No.6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan sarana dan prasaranadesa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dijelaskan pada bagian ketiga bahwa dalam pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Pembangunan fisik desa juga harus mengedepankan partisipasi masyarakat, seperti yang terjadi di desa Anjungan Dalam, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, agar pembangunan fisik yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memunculkan rasa memiliki agar masyarakat dengan sadar merawat hasil pembangunan di Desa Anjungan Dalam.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan sendiri bias berbeda-beda di antara bidang-bidang partisipasi dalam pembangunan, seperti bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi/monitoring dan pemanfaatan hasil. Secara teori perbedaan tersebut dapat pula disebabkan oleh adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah kesadaran, keamanan, Pendidikan dan penghasilan. Sedangkan faktor eksternal berupa kapasitas kepemimpinan dan fasilitas yang tersedia.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang tingkat partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik Desa Anjungan Dalam, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Mempawah. Sehubungan dengan hal tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Desa Anjungan Dalam, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Mempawah”.

2. Identifikasi Masalah

1. Kurangnya Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan hasil pembangunan di Desa Anjungan Dalam, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Mempawah.

3. Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan, maka peneliti memfokuskan penelitian pada Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik Jalan Usaha Tani di RT.006 Desa di Desa Anjungan Dalam Kecamatan Anjungan Kabupaten Mempawah.

4. Rumusan Masalah

Berpangkal dari identifikasi permasalahan pada focus penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Jalan Usaha Tani di RT.006 di Desa Anjungan Dalam Kecamatan Anjungan Kabupaten Mempawah?

5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mendeskripsikan

dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan Fisik di Desa Anjungan Dalam Kecamatan Anjungan Kabupaten Mempawah.

6. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi atau sumbangsih pemikiran khususnya kepada masyarakat tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sebagai ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan referensi dalam bahan keilmuan, juga memenuhi persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi di Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Menambah cakrawala pengetahuan khususnya terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sekaligus menambah pengalaman dalam praktik penelitian akademis

2. Bagi Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Anjungan Dalam Menjadi daftar referensi saran dan masukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Anjungan Dalam Kecamatan Anjungan Kabupaten Mempawah.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Yadav dalam bukunya Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto (2019 : 82-84), yang mengemukakan tentang adanya empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan, yaitu partisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

A. Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam

pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal. Partisipasi atau peranserta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program yang dilaksanakan.

Dimaklumi bahwa anggaran pembangunan yang tersedia adalah relative terbatas sedangkan program pembangunan yang dibutuhkan (yang telah direncanakan) jumlahnya relative banyak, maka perlu dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat untuk menunjang implementasi pembangunan program yang ada di masyarakat.

Dengan partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, berarti dalam penyusunan program pembangunan dilakukan penentuan prioritas (urutan berdasarkan

besar kecilnya tingkat kepentingan), dengan demikian pelaksanaan program pembangunan akan terlaksana secara efektif dan efisien.

Dengan penyusunan program pembangunan secara terarah dan serasi dengan kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan program pembangunan secara efektif dan efisien, berarti distribusi dan alokasi faktor-faktor produksi dapat dilakukan secara optimal.

Perencanaan dilihat dari segi suatu alat atau cara untuk mencapai tujuan dengan lebih baik mendapatkan alasan yang lebih kuat untuk melakukan perencanaan:

1. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditunjukkan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
2. Dengan perencanaan maka di lakukan suatu perkiraan (*forecasting*) terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui, perkiraan dilakukan

mengenaipotensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan resiko yang mungkindi hadapi, perencanaan mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi sedikit mungkin.

3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik.
4. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya.

B. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumber daya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal

lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau ditingkat lokal.

C. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan. Di lain pihak, lapisan yang di atasnya (yang umumnya terdiri atas orang-orang kaya) dalam banyak hal lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tidak dituntut sumbangannya secara proposional. Karena

itu, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk sumbangan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan.

D. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan

Kegiatan pemantauan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sebagai diperlukan.

E. Partisipasi dalam Pemanfaatan hasil pembangunan

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting

yang sering terlupakan. Sebab, tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Di samping itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.

2. Alur Pikir Penelitian

Gambar 1
Bagan Kerangka Pikir

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik Desa Anjungan Dalam Kecamatan Anjungan Kabupaten Mempawah



Masalah:

1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan hasil pembangunan fisik di Desa Anjungan Dalam, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Mempawah.



Teori

Yadav dalam Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2019:82-84), yang mengemukakan tentang adanya empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan, yaitu:

1. Partisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan;

2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi; serta
4. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.



Deskripsi dan analisis Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan hasil pembangunan fisik di Desa Anjungan Dalam, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Mempawah.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu ciri atau karakter dan sifat tentang fenomena tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sering juga disebut metode penelitian *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Penelitian alamiah adalah upaya untuk menjelaskan fenomena nyata yang kita alami dengan menetapkan prinsip umum untuk menerangkannya.

Objek adalah hal, perkara atau yang menjadi pokok pembicaraan atau yang dijadikan sasaran untuk diteliti dan

diperhatikan. Di dalam penelitian ini, peneliti telah menemukan objek penelitian untuk melaksanakan penelitian, agar tidak menyimpang dari focus penelitian, adapun yang menjadi objek penelitian adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik Jalan Usaha Tani RT.006 di desa Anjungan Dalam Kecamatan Anjungan Kabupaten Mempawah. adapun yang menjadi subjek penelitian adalah:

1. Kepala Desa Anjungan Dalam
2. Aparatur dan Staf Kantor Desa Anjungan Dalam
3. Ketua RT.006 Desa Anjungan Dalam
4. Kepala Dusun 1 Desa Anjungan Dalam
5. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Jalan Usaha Tani RT.006
6. Tim Penerima Hasil (TPH) Pembangunan Jalan Usaha Tani RT.006
7. Masyarakat Penerima Hasil Pembangunan Jalan Usaha Tani RT.006 Desa Anjungan Dalam

Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas penulis menggunakan teknik wawancara dan observasi guna mendukung data lapangan yang telah didapatkan.

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Miles and Huberman (Sugiyono, 2007: 91) mengemukakan bahwa “Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data diantaranya:

1. Meringkas (*reduksi*), tujuannya agar data yang dianalisis merupakan data-data yang benar-benar berkaitan dengan masalah penelitian.
2. Memaparkan (*display*), Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya

berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

Penyimpulan (*verifikasi*), data-data yang diperoleh yang telah diringkas dan dipresentasikan kemudian diambil beberapa kesimpulan yang paling relevan dengan masalah yang diteliti.

D. PEMBAHASAN

1. Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan

Pembangunan masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi pembangunan masyarakat merupakan tanggungjawab bersama. Bertolak dari pernyataan tersebut, pembangunan masyarakat khususnya pembangunan masyarakat desa identik dengan ciri dari, oleh dan untuk masyarakat, sangat mengharapkan keterlibatan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Pembangunan masyarakat desa tidak akan dapat mencapai hasil yang optimal tanpa adanya kerjasama dari pihak lain. Diantaranya adalah perangkat desa dan masyarakat sasaran pembangunan. Begitu pula dengan pembangunan masyarakat

desa. Peran dari masyarakat sangatlah penting bagi keberhasilan pembangunan masyarakat.

Berdasarkan informasi dari narasumber serta data yang ditemukan, ada partisipasi masyarakat dalam bentuk memutuskan pembangunan yang dilaksanakan di desa, dengan memberikan usulan pembangunan di wilayahnya melalui Musyawarah Tingkat RT-RW dan Musyawarah Desa. Selain itu karena adanya kesadaran pribadi untuk membantu terlaksananya pembangunan, dalam hal ini masyarakat ikut memberi sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan pembangunan desa, masyarakat member masukan/solusi terhadap masalah pelaksanaan yang timbul dalam pembangunan desa.

2. Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa

Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. Dalam pelaksanaan suatu program memiliki ruang lingkup antara

lain yang pertama adalah menggerakkan sumber daya dan dana, yang kedua kegiatan administrasi dan koordinasi dan yang ketiga adalah penjabaran program (Cohen dan Uph off dalam (Siti Irene Astuti D (2011: 61- 63)).

Berdasarkan informasi dari narasumber serta data yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Anjungan Dalam khususnya RT.006 berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Tidak hanya berkontribusi secara fisik atau gotong royong, beberapa warga juga memberikan sumbangan makan dan minum bagi pekerja, bahkan beberapa warga yang tanahnya dilewati jalur pembangunan Jalan Usaha Tani di RT.006 juga menghibahkan tanahnya menjadi sarana umum. Ini menunjukkan partisipasi masyarakat di Desa Anjungan Dalam terkhusus RT.006 berjalan baik.

3. Partisipasi Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan

Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang

ditetapkan atau ada penyimpangan. Dalam hal ini dalam pencapaian tujuan dari Pembangunan Jalan Usaha Tani di RT.006 Desa Anjungan Dalam Kecamatan Anjungan Kabupaten Mempawah, maka dilakukan evaluasi program. Dalam partisipasi ini kita dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan secara menyeluruh sehingga perlu adanya evaluasi terhadap suatu program yang telah berjalan (Cohen dan Uph off dalam (Siti Irene Astuti D (2011 : 61-63)).

Berdasarkan informasi dari narasumber serta data yang ditemukan, Pemerintah Desa Anjungan Dalam bersama BPD dan Inspektorat Kabupaten melakukan evaluasi usai pembangunan dilaksanakan. Hal ini dilaksanakan untuk menjaga kualitas pembangunan sekaligus mengecek langsung hasil pembangunan yang dilaksanakan agar sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Rencana Anggaran Biaya. Namun ada ketidakpahaman masyarakat dalam berkontribusi atau berpartisipasi dalam tahap evaluasi pembangunan sebagaimana yang diungkapkan oleh Tessa (24).

Maka dapat peneliti sebut bahwa masih adanya masyarakat Desa Anjungan Dalam Kecamatan Anjungan Kabupaten Mempawah yang belum memahami tahapan atau proses partisipasi dalam evaluasi pembangunan. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Anjungan Dalam kedepannya guna memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Meskipun proses evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penerima Hasil sudah berjalan dengan baik.

4. Partisipasi Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Pemanfaatan hasil pembangunan merupakan wujud penerimaan masyarakat terhadap hasil pembangunan dengan asumsi apabila masyarakat bersedia untuk memanfaatkan suatu hasil pembangunan berarti masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung juga menerima hasil pembangunan tersebut. Manfaat yang diperoleh masyarakat dari pembangunan infrastruktur baik berupa sarana dan

prasarana tersebut adalah agar Anjungan Dalam memiliki suatu perubahan dengan adanya pembangunan yang tidak tertinggal seperti desa-desa yang lainnya. Hal ini lebih jauh lagi dari sekedar menerima dan memanfaatkan adalah dengan memelihara hasil pembangunan tersebut sebagai wujud dari kepedulian masyarakat terhadap hasil pembangunan tersebut.

Berdasarkan informasi dari narasumber serta data yang ditemukan, masyarakat memiliki kesadaran dalam pemeliharaan hasil pembangunan dengan mengagendakan gotong royong untuk membersihkan area sekitar jalan. Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Anjungan Dalam berpartisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan Jalan Usaha Tani di RT.006.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Anjungan Dalam Kecamatan

Anjungan Kabupaten Mempawah, dapat peneliti simpulkan bahwa:

1. Masyarakat Desa Anjungan Dalam Kecamatan Anjungan Kabupaten Mempawah berpartisipasi dalam tahap Perencanaan Pembangunan, partisipasi masyarakat tersebut dapat dilihat dengan keterlibatan masyarakat dalam musyawarah-musyawarah perencanaan pembangunan dari musyawarah tingkat RT, Musyawarah Dusun (Musdus) hingga Musyawarah Pembangunan Desa (MusrebangDes).
2. Masyarakat Desa Anjungan Dalam Kecamatan Anjungan Kabupaten Mempawah berpartisipasi aktif dalam Pelaksanaan Pembangunan, partisipasi masyarakat tersebut dapat dilihat dengan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Jalan Usaha Tani RT.006 yang pekerjaanya adalah masyarakat RT.006 dan kepala tukangya adalah ketua RT.006 itu sendiri, hal tersebut merupakan bentuk

kontribusi secara fisik masyarakat dalam sebuah pembangunan. Kontribusi masyarakat juga berupa sumbangan tanah untuk pembangunan jalan umum tersebut dan makanan-minuman bagi pekerja yang melaksanakan pembangunan Jalan Usaha Tani RT.006.

3. Masyarakat Desa Anjungan Dalam Kecamatan Anjungan Kabupaten Mempawah berpartisipasi dalam tahap evaluasi pembangunan namun belum maksimal, hal ini ditunjukkan oleh ketidaktahuan informan dalam penelitian ini, juga adalah masyarakat penerima hasil pembangunan Jalan Usaha Tani RT.006, yang tidak tahu jalur atau arah untuk masyarakat untuk melakukan evaluasi dalam pembangunan (jika adahal yang ingin di evaluasi oleh masyarakat) selain melaporkan kepada ketua RT di wilayah tersebut.
4. Masyarakat Desa Anjungan Dalam Kecamatan Anjungan Kabupaten

Mempawah berpartisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan, partisipasi masyarakat dapat dilihat dengan dimanfaatkannya Jalan Usaha Tani RT.006 oleh para petani dan pekebun untuk menuju sawah dan kebun, serta pengangkutan hasil panen.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang analisis pelaksanaan pembangunan desa di Desa Anjungan Dalam Kecamatan Anjungan Kabupaten Mempawah, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu ditingkatkan kembali Partisipasi Masyarakat Desa Anjungan Dalam Kecamatan Anjungan Kabupaten Mempawah dalam tahap Perencanaan Pembangunan, dapat melalui sosialisasi langsung, agar masyarakat tetap terlibat aktif dalam proses perencanaan pembangunan di wilayah mereka, baik di musyawarah tingkat RT,

- Musyawarah Dusun (Musdus) hingga Musyawarah Pembangunan Desa (MusrembangDes).
2. Perlu ditingkatkan kembali Partisipasi Masyarakat Desa Anjungan Dalam Kecamatan Anjungan Kabupaten Mempawah berpartisipasi dalam Pelaksanaan Pembangunan, agar masyarakat tetap terlibat aktif dalam berbagai pembangunan baik fisik maupun pembangunan non fisik di wilayahnya.
 3. Perlu diadakan sosialisasi terkait peran masyarakat dalam tahap evaluasi pembangunan ataupun peran masyarakat dalam pembangunan desa secara umum di Desa Anjungan Dalam Kecamatan Anjungan Kabupaten Mempawah, melihat masih adanya masyarakat yang belum memahami cara berpartisipasi dalam tahapan evaluasi dengan benar dalam sebuah pembangunan di wilayahnya.
 4. Perlu ditingkatkan kembali Partisipasi Masyarakat Desa

Anjungan Dalam Kecamatan Anjungan Kabupaten Mempawah berpartisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan, seperti gotong royong atau pemeliharaan bersama oleh masyarakat terhadap hasil pembangunan Jalan Usaha Tani RT.006, agar hasil pembangunan bertahan lama dan masyarakat mempunyai rasa kepedulian terhadap hasil pembangunan di wilayahnya.

F. REFERENSI

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Holil Soelaiman. 1980. *Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*. Bandung.
- Huraerah, Abu. 2011. *Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.

- Isbandi, Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis As et Komunitas : Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: Fisip UI press.
- Khairuddin. 1992. *Pembangunan Masyarakat. Tinjauan Aspek; Sosiologi, Ekonomi, dan Perencanaan*. Yogyakarta : Liberty.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Kusnaedi. 1995. *Membangun Desa : Pedoman Untuk Penggerak IDT, Mahasiswa KKN, Dan Kader Pembangunan Desa*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Lexy. J. Moleong, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja
- Posdayakarya. Mardikanto, T. dan Soebianto. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Miles & Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjetjep Rohendi; pendamping, Mulyarto. Jakarta: UI-Press.
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Nadi Pustaka.
- Setiadi, Elly M. & Kolip, Usman. 2013. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: Prenadamedia.
- Siagian, Sondang. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang. 2005. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siti Irene Astuti Dwiningrum. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sjafrizal. 2016. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press. Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Theresia, Aprilia dkk. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

Usman, Husaini. 2013. *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Edisi Keempat. Jakarta Timur: Bumi Aksara.

Yuwono, Teguh. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru*. Semarang: Ciyapps Diponegoro University.

Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979

tentang Pemerintahan Desa
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Skripsi:

Nirwan, Andi. 2016. "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Randau Jekak Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang." Skripsi., Universitas Tanjungpura

Tjokroamijoyo, Bintoro. 1976. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.

Sofia, Nurul. 2015. "Partisipasi Masyarakat dalam Musrebang Desa di Desa Simpang Tiga Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara." Skripsi., Universitas Tanjungpura.